

MENELISIK RASA KEADILAN PIDANA PADA NARAPIDANA WANITA

Choirun Nisa, Fathul Lubabin Nuqul

Fakultas Psikologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Email: cieroen.cieroen@yahoo.co.id. fathullubabinnuqul@yahoo.co.id.

Abstrak. Dalam kajian psikologi keadilan dikaji secara subyektif. Dalam kajian tersebut keadilan tidak selalu berdiri sendiri, keadilan selalu harus berada dalam konteks tertentu. Terkait dalam keadilan dalam bidang hukum pidana, keadilan akan merambah pada pihak pelaku atau narapidana, korban dan masyarakat, yang menurut *self interest model*, mempunyai bentuk dan tuntutan yang berbeda untuk kepentingan diri sendiri, sehingga bias-bias rasa keadilan antar pihak tersebut sangat mungkin mengalami kesenjangan. Pada penelitian ini memfokuskan pada rasa keadilan pada narapidana. Status narapidana merupakan status hukum, yang merupakan hasil dari proses hukum dari mulai kepolisian sampai pengadilan dan sampai pada Lembaga Pemasyarakatan. Dalam proses dari terdakwa dan kemudian menjadi narapidana tentu terlibat secara emosi dan kognisi terkait dengan perlakuan (prosedural), kelayakan antara tindakan dan hukumannya (retributif) serta keyakinan dia tentang kemanfaatan dari pidana yang diterima (restoratif). Untuk itu menarik kiranya untuk menelusuri rasa keadilan pada narapidana, baik keadilan prosedural, keadilan retributif maupun keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologis. Penelitian ini melibatkan 4 orang narapidana wanita dari LP Wanita Klas II A Malang sebagai informan utamanya. Hasilnya menunjukkan bahwa dari ke 4 orang, 3 orang diantaranya merasa bahwa pidana yang diterimanya tidak tepat dan terlalu berat. Selain itu narapidana umumnya merasakan ketidakadilan pada prosedur, terutama yang dilakukan baik di pengadilan, meskipun demikian mereka merasa mendapatkan banyak perubahan dari kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Keadilan, Pidana, Narapidana.

PENDAHULUAN

Keadilan sosial juga memiliki dimensi objektif dan subjektif (Faturachman, 2002). Keadilan objektif berkaitan dengan kapasitas untuk menyesuaikan dengan standar normatif yang berlaku sehingga bias dan prasangka bisa direduksi seminimal mungkin. Pada sisi lain, keadilan subjektif berkaitan dengan kapasitas distribusi ataupun prosedur untuk membangkitkan perilaku keadilan oleh pihak-pihak yang terkena norma tersebut. (Faturachman, 2002: 21-22). Menurut John Rawls, prinsip-prinsip psikologi moral mempunyai satu tempat bagi konsepsi keadilan. (Rawls, 2006: 638). Psikologi memfokuskan diri pada ranah bagaimana seseorang menjabarkan rasa keadilan,

bagaimana seseorang berpendapat dengan melalui pikirannya tentang keadilan (Skitka & Crosby, 2003). Sehingga “apa yang dikatakan adil” adalah berasal dari keterkaitan antara sisi objektif dengan sisi persepsi subjektif tentang keadilan. Individu menilai suatu keputusan itu adil atau tidak adil, merupakan proses psikologis ditingkat individu (Nuqul, 2008:44). Faturachman (2001:84) mengatakan bahwa proses penilaian keadilan dapat dikaji berdasarkan prinsip-prinsip psikologi kognitif.

Terkait dengan pemidanaan di Indonesia melibatkan pihak-pihak yang meliputi, aparat hukum dari mulai polisi, jaksa, dan hakim, juga korban serta pelaku. Pelaku mempunyai sebutan yang berbeda-beda pada tiap proses hukum yang dilaluinya, mulai dari tersangka ketika berproses di kepolisian, terdakwa ketika di pengadilan dan kemudian disebut dengan narapidana jika putusan pengadilan menganggap pelaku bersalah dan dianggap sudah layak menanggung kesalahan tersebut. Pihak aparat mempunyai peran sebagai pembuat putusan yang adil, sedangkan korban dan pelaku sebagai pihak yang menerima putusan tersebut. Pada penelitian ini memfokuskan pada rasa keadilan yang dirasakan oleh narapidana ketika berproses di kepolisian sampai di lembaga pemasyarakatan.

Banyak penelitian tentang psikologi pemidanaan di Indonesia yang memfokuskan pada pengambilan keputusan serta penilaian keadilan dari sudut pandang hakim, kepolisian atau bahkan masyarakat awam, tetapi belum banyak penelitian tentang penilaian keadilan pemidanaan yang harus diterima oleh narapidana. Padahal para pelaku kejahatan mempunyai hak yang dijamin oleh KUHP untuk mendapatkan pendampingan pengacara bahkan diberi kesempatan untuk melakukan banding jika putusannya dirasa tidak adil. Secara teori keadilan pemidanaan mempunyai tiga ranah yaitu keadilan retributif, keadilan restoratif dan keadilan procedural.

Keadilan retributif berasal dari ide dasar *Lex Talionis* yaitu seseorang berhak untuk mendapatkan pengalaman atau imbalan yang setimpal seperti apa yang telah lakukan terhadap orang lain (Nuqul, 2010:31). Model keadilan retributif ini menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, maka hukuman yang diterima oleh pelaku merupakan hukuman yang ditujukan untuk membalas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan pelaku (Vidmar, 2001). Agung (2012) menyatakan bahwa teori

retributif ini mengatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perilakunya, akibatnya dia harus menerima hukuman yang setimpas (Agung, 2012). Untuk itu mengetahui penerimaan narapidana pada hukuman yang mereka jalani merupakan obyek yang menarik untuk diteliti.

Keadilan restoratif merupakan keadilan terkait dari efek pemidanaan baik untuk pelaku, korban dan masyarakat. Tony Marshall (dalam Wiranta, 2010:5) menyebutkan bahwa “keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan semua pihak pada kejahatan, khususnya untuk memecahkan secara bersama-sama bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan dan implikasinya di masa mendatang”. Untuk itu penelitian ini memfokuskan pada penilaian narapidana tentang manfaat yang dirasakan selama proses hukum terutama saat narapidana tersebut berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Keadilan prosedural, merupakan penilaian tentang prosedur yang dilakukan untuk menentukan hukuman bagi narapidana. Faturochman dan Ancok (2001) menunjukkan bahwa suatu prosedur yang tepat akan berpengaruh pada penilaian seseorang tentang keadilan prosedural. Penelitian memfokuskan juga pada rasa keadilan prosedural mulai dari proses penangkapan pada kepolisian, pengadilan hingga kehidupan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa penilaian keadilan dalam kajian psikologi bersifat subyektif dan proses kognisi individu memainkan peran yang dominan dalam penilaian keadilan tersebut. Beberapa teori yang dianggap paling layak untuk diajukan sebagai kerangka penjas keadilan yang dirasakan oleh narapidana dalam penelitian kali ini antara lain, *reference cognitive theory*, *heuristic judgment theory* dan teori *attribution bias*.

Reference cognitive theory ini paling relevan untuk menjelaskan keadilan yang diterima oleh narapidana. Penilaian tidak adil dapat diprediksi akan muncul jika referensi hasil tinggi, justifikasi rendah, dan peluang juga rendah. Sebaliknya, bila referensi hasil rendah, justifikasi tinggi dan peluang tinggi, maka seseorang akan menilai adil paling tinggi (Faturochman, 2002: 75). Begitu juga pada narapidana jika perkiraan mereka lebih tinggi dari putusan hakim maka cenderung hukuman tersebut dianggap tidak adil. Demikian juga jika narapidana merasa bahwa tidak ada celah untuk

melakukan koreksi pada putusan hakim seperti upaya banding, maka dia merasa diperlakukan tidak adil, dan dia juga merasa ada kesalahan dalam proses (justifikasi) maka putusan hakim juga dianggap tidak adil. Teori ini dianggap relevan untuk penilaian keadilan retributif, dan dari teori ini juga menunjukkan bahwa rasa keadilan procedural (sebagai justifikasi) mendahului penilaian retributif.

Heuristic Judgment, menurut Myers (2010:123) adalah sistem kognitif mengkhususkan pada jalan pintas mental yang cepat. Dengan kemudahan yang luar biasa, seseorang membentuk kesan, membuat penilaian, dan menciptakan penjelasan, kita melakukan hal tersebut dengan menggunakan *heuristic* mudah, strategi berfikir yang efisien. mengatakan bahwa seseorang cenderung hanya menggunakan sedikit informasi yang dia dapat untuk melakukan upaya pembuatan simpulan dalam teori ini juga memasukkan *self attribution bias* sebagai bagian dari bias penilaian yang terjadi. Hal ini dipertegas oleh teori *self interest model* yang menekankan keadilan yang orientasinya pada hasil (Faturochman, 2002:28). Pada intinya adalah proses yang berlangsung adalah upaya untuk mendapatkan bagian yang besar dengan melakukan maksimalisasi sumber daya yang personal dengan cara melakukan kontrol proses dan pengambilan keputusan. Teori menjelaskan bahwasannya secara subyektif, prosedur dikatakan adil bila mengakomodasi kepentingan individu (Faturochman, 2002: 26).

Dari singkat diatas menarik kiranya menelisik rasa keadilan pada narapidana, guna memberikan pemahaman pada semuanya bahwa proses dan putusan hukum tidak hanya bergantung pada norma atau undang-undang semata. Ada faktor keadilan sebagai dasar unsur kemanusiaan yang perlu dikedepankan bagi para aparat (Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas LP) untuk memberikan *treatment* yang tepat pada para pelaku kejahatan sehingga akan tercapai keadilan yang sesungguhnya yang berimbaskan pada penemuan kembali supremasi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam metode penelitian adalah kualitatif fenomenologi, subyek penelitian sebanyak 4 orang narapidana wanita dengan kriteria *purposive* Marshall B. Clinard dan Richard Quinney (dalam Husein, 2003:4) dengan kriteria sesuai teori

tersebut yaitu kejahatan pidana yang merugikan diri sendiri (pelaku narkoba), kejahatan pidana yang menghilangkan nyawa seseorang (pelaku pembunuhan), serta kejahatan pidana yang menghilangkan harta benda seseorang (pelaku pencurian).

Tabel 1. Subyek Penelitian dan Dakwaan

No	Inisial Subyek	Tindak Kriminal	Pasal Dakwaan
1	RM	Pembunuhan	356
2	QQ	Pencurian	363 (1) dan 372
3	NK	Pengedar	114(1)
4	FB	Pemakai Sabu-Sabu	116

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini dilaksanakan Lembaga Permasyarakatan Klas II A Wanita. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumen berupa BAP (berita acara pemeriksaan). Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data dan mengemlompokkan data yang menggunakan teknik Glasser-Strauss, Miles-Huberman meliputi sebagai berikut: membuat transkrip wawancara (verbatim), membuat satuan makna atau kumpulan fakta sejenis (sesuai tujuan penelitian), melakukan kategorisasi atau mengumpulkan makna yang sesuai dengan tema, membuat ringkasan dan proses validitas data, membuat ringkasan dari tema umum dan tema unik. Adapun uji keabsahan data yang digunakan meliputi uji kredibilitas (triangulasi sumber data),ujitrasnferabilitas, ujidependabilitas, ujikonfirmasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan secara umum subyek penelitian memaknai keadilan adalah mengenai prinsip persamaan (equality) antara pembagian hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama (prosedural), namun terdapat subyek yang memaknai keadilan berdasar apa yang telah didapat atau manfaat yang didapat (restoratif) atas hukuman (retributif) yang telah didakwakan hakim. Sedangkan hasil penelitian tentang makna keadilan prosedural, secara umum subyek penelitian merasa tidak adil secara prosedural. Secara umum, tentang makna keadilan retributif, subyek penelitian merasa tidak adil atas hukuman yang telah diterimanya. Meskipun tidak adil

namun secara keseluruhan subyek penelitian merasakan mendapatkan banyak perubahan dari kehidupannya di dalam lembaga permasyarakatan.

1. Makna Keadilan Pidana bagi Narapidana

Subyek NK (pengedar sabu) memaknai keadilan adalah jika segala sesuatu selalu dihubungkan dengan Tuhan, pasti semua akan merasakan dan mengatakan bahwa apa yang menimpa seseorang selalu adil. Kemudian subyek NK (pengedar sabu) merasa bahwa usahanya untuk memperoleh keadilan adalah usaha yang sia-sia. Sehingga dirinya lebih memilih untuk menerima hukuman selama 4 tahun 5 bulan kurungan. Berikut adalah pernyataan subyek NK (pengedar sabu):

Adil itu jika sesuatu selalu dihubungkan dengan Tuhan, pasti kita semua akan merasakan dan mengatakan bahwa apa yang menimpa kita selalu adil. Aku juga percuma ketika harus marah, dan aku juga sudah usaha untuk berjuang, tapi percuma aja kan, malah aku tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, yawes lah ya, diterima ae, Allah punya rencana yang kita gak tahu. Ya itu aja sich kalau menurutku. Kalau kita mikirnya karena Allah, pasti adil. (Wawancara, NK pengedar sabu, Binpas, 23 Juli 2012)

Berbeda dengan subyek QQ (pencurian) memaknai keadilan adalah bagaimana melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, setelah itu mendapatkan hak. Subyek mencontohkan, apabila melaksanakan kewajiban kerja sebagai narapidana, maka ia mendapat haknya sebagai narapidana. Seperti yang diungkapkan oleh subyek QQ (pencurian) :

ya adil itu ketika kita menjalankan kewajiban kita, kemudian kita baru bisa minta hak kita. Misalnya kayak kewajibanku sholat jamaah, kerja dan gak mangkir dari kerja, nah berarti aku sudah bisa dapet hakku sebagai napi, misalnya nelpon 3 menit gak kurang gak lebih, dapet besuk 15 menit, ya gak kurang dan gak lebih, nah itu sudah adil menurutku (Wawancara, QQ pencurian, Binpas, 24 Juli 2012)

Selanjutnya subyek FB (pemakai sabu) memaknai keadilan adalah ketika memperlakukan seseorang dengan sama rata, dan menilai adil tidaknya sesuatu harus berdasarkan fakta bukan hanya informasi dari orang lain.

adil itu ya memperlakukan orang itu sama rata, antara yang miskin, kaya. Terus adil itu kalo kita menilai itu harus berdasarkan apa yang dilihat gitu, jadi harus tau faktanya dulu, jangan hanya cuma dapet info terus bisa menilai orang. (Wawancara, FB pemakai sabu, Binpas, 25 Juli 2012)

Secara umum, seluruh subyek memaknai keadilan adalah mengenai prinsip persamaan (*equality*) antara pembagian hak dan kewajiban, serta persamaan dalam perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum narapidana memaknai keadilannya adalah berdasarkan keadilan prosedural dan distributif. Meskipun demikian ada pula yang memaknai keadilannya adalah mengenai bagaimana menerima hukuman dan mengambil manfaat (hikmah) atas hukuman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa subyek NK (pengedar sabu) lebih cenderung memaknai keadilan secara restoratif, yaitu dirinya lebih berfokus pada manfaat yang diperoleh atas hukuman yang membuat dirinya jera secara retributif.

2. Keadilan Prosedural

Dalam paparan data ini, peneliti memaparkan bagaimana deskripsi keadilan prosedural yang terjadi pada narapidana wanita. Sejumlah pengakuan dinyatakan oleh subyek FB (pemakai sabu), bahwasannya jika pelaku menjawab pertanyaan pihak kepolisian dengan tidak berbelit-belit, maka polisi akan memperlakukan dengan kooperatif. Berikut ungkapan dari subyek;

emm gak ada sich, baik semua, dan ketika kita jawabnya gak mbulet ya polisinya juga gak nyentak-nyentak atau marah-marah. Dan ditanya sekitar, kamu dapat barang darimana, dimana ngambilnya, dan polisinya selalu nyari “ndas” kan, jadi misalnya polisinya bilang, hayo kamu kasih tau bandarnya engkok kamu tak lepasin, yo aku emoh lah, ya mereka emang cari tersangka juga tapi aku juga gak akan mungkin dilepasin. (Wawancara, FB pemakai sabu, Binpas, 25 Juli 2012)

Dalam proses penangkapan dan penyidikan kepolisian, subyek NK (pengedar sabu) menyatakan bahwa polisi memperlakukan subyek dengan kooperatif, bila subyek juga bersikap kooperatif. Hal ini sebagaimana diungkapkan subyek kepada peneliti sebagai berikut;

kalo mereka sich, baik ya memperlakukannya selama kita juga kooperatif, tapi ada beberapa polisi juga yang malah ngambil'i barang, selain barang bukti, misalnya kayak handphone, perhiasan, uang, nah mereka itu ngambil, setelah tak tanya dan tak minta, mereka malah bilang, wah aku gak tau. Nah itu loh aku yang bikin mangkel, ada juga yang bilang, ini jam-mu tak ambil ya, kalo kayak gitu masih mending, masih mau bilang. (Wawancara, NK pengedar sabu, Binpas, 13 Juli 2012).

Namun hal yang menarik subyek menceritakan bahwasannya, terdapat beberapa oknum atau pihak aparat yang melakukan penangkapan yang berbuat kecurangan dengan mengambil barang tersangka tanpa ijin. Beberapa barang yang diambil seperti; *handphone*, perhiasan, dan uang tunai. Berikut ungkapan subyek;

kalo mereka sich, baik ya memperlakukannya selama kita juga kooperatif, tapi ada beberapa polisi juga yang malah ngambil'i barang, selain barang bukti, misalnya kayak handphone, perhiasan, uang, nah mereka itu ngambil, setelah tak tanya dan tak minta, mereka malah bilang, wah aku gak tau. Nah itu loh aku yang bikin mangkel, ada juga yang bilang, ini jam-mu tak ambil ya, kalo kayak gitu masih mending, masih mau bilang. (Wawancara, NK pengedar sabu, Binpas, 13 Juli 2012).

Subyek pun, berusaha meminta barang miliknya kepada aparat yang menangkap, namun hal tersebut justru sia-sia, karena aparat mengatakan bahwasannya mereka tidak tahu menahu terkait barang milik subyek pada saat penangkapan berlangsung. Hal tersebut memunculkan rasa jengkel. Menurut subyek NK (pengedar sabu), hal yang masih wajar ketika ada aparat yang meminta barang dengan meminta ijin langsung pada subyek.

Belum lagi, pada saat subyek NK (pengedar sabu), ditangkap oleh polisi dan diintrograsi bukan di tempat yang biasa. Menurut pengakuan subyek, bahwa dirinya

masih harus diintrograsi di hotel selama 2 hari dan tidak dapat keluar dari hotel tersebut, belum lagi subyek harus membayar tarif hotelnya. Tujuannya adalah agar polisi dapat menghubungi rekan pengedar sabu lainnya, berikut ungkapan subyek NK;

Nah posisine iki aku waktu iku 2 hari hilang, sempet aku dimasukkan hotel. Ngunu iku aku sing bayar hotel'e 2 hari. Akhirnya setelah iku aku ditahan. (Wawancara, NK pengedar sabu, Binpas, 13 Maret 2012)

yo iyo jadi sebelum aku ditahan iku aku ditaruh di hotel, cuma hubungi hari iku. Barang-barangku wes disita. Aku 2 hari gak bisa kemana-mana. (Wawancara, NK pengedar sabu, Binpas, 13 Maret 2012)

Implikasinya, bahwa hal ini menunjukkan bahwa perlakuan petugas polisi dalam penangkapan sering kurang menyenangkan dan seolah-olah memanfaatkan tersangka untuk memperoleh kepentingan pribadi, seperti harus mengambil barang berharga milik tersangka tanpa seijin dari tersangka, kemudian barang tersebut tidak dikembalikan kepada tersangka. Selanjutnya, ketika tersangka diintrograsi harus berada dalam hotel selama 2 hari dan tidak dapat keluar dari hotel tersebut. Perlakuan seperti demikian, merupakan perlakuan yang menekan kondisi psikologis tersangka, sehingga jawaban yang diberikan oleh tersangka cenderung kurang tepat. Pada akhirnya sangat jelas, bahwa indikasi perlakuan yang kurang menyenangkan pada subyek NK (pengedar sabu) merupakan adanya indikasi ketidakadilan dalam proses atau ketidakadilan prosedural.

Terdapat teori *self interest model* yang dapat menjelaskan mengapa seseorang cenderung ingin diperlakukan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan proses yang *fair*, serta berupaya berjalan sesuai keinginannya. Teori menjelaskan bahwasannya secara subyektif, prosedur dikatakan adil bila mengakomodasi kepentingan individu (Faturachman,2002:26). Sering kali, orang berupaya untuk tidak sekedar mendapatkan keinginannya, tetapi juga mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (Faturachman,2002:26). Disini dapat dijelaskan sesuai dengan permasalahan subyek NK (pengedar sabu) bahwa mengapa dirinya merasa tidak diperlakukan dengan *fair*, karena menurut penilaian subyektifnya proses penangkapan

tersebut telah merugikan dan ia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya yaitu seperti dirinya mengakui bahwa harus membayar sejumlah tarif hotel yang digunakan untuk interogasi, kemudian ia juga tidak mendapatkan apa yang diinginkannya yaitu barang berharga miliknya. Barang-barang tersebut tidak dikembalikan oleh petugas kepada dirinya.

Namun berbeda dengan apa yang dikatakan oleh subyek RM (pembunuhan), sejumlah aparat polisi yang menangkap dan menginterogasi dirinya justru memperlakukan dirinya dengan tidak baik, seperti mengatakan kata-kata yang menghina kepada subyek, kemudian perlakuan yang kurang menyenangkan adalah ketika barang milik subyek disita dan tidak dikembalikan kepada subyek. Subyek juga mengatakan terdapat beberapa oknum yang mengambil barang milik subyek, tanpa meminta izin kepada subyek dan barang tersebut tidak dikembalikan kepada subyek. Berikut ungkapan subyek;

Ya Allah mbak rasana ngenes aku, kabe buser iku 25, lebih malah iku jahat-jahat. Mereka nakok'i aku, akhir'e kok pas aku ketemu salah siji buser'e jeneng'e pak sabar, kok ndilala wong'e yo sabar, aku langsung cerito nek uwong'e nek aku iki isok mateni uwong gara-gara bojoku duwe utang akeh. (Wawancara, RM pembunuhan, Binpas, 3 April 2012)

Terus enek maneh mbak, mboh petugas iku pas njupuk hapeku sing elek, anting-anting'e anakku. Aku wes ngomong nek tak kon nguwehne keluargaku, tapi yo ngunu, gak dibalek-balekno sampek saiki karo polisine. Yo wes dijupuk karo polisine iku. Padahal seharga piro sech tapi wes jarno ae lah. (Wawancara, RM pembunuhan, Binpas, 3 April 2012)

Pada saat penangkapan oleh sejumlah buser, subyek mengaku bahwasannya dirinya ditangkap sejumlah polisi di tempat ia bekerja. Kemudian subyek ditahan di tahanan Kediri. Proses penangkapan dan reka ulang melibatkan sejumlah aparat polisi. Menurut pengakuan subyek merasa terintimidasi oleh aparat, karena menurutnya aparat memperlakukan subyek dengan cara yang kurang menyenangkan. Demikian pengakuan subyek RM (pembunuhan);

yo kabeh polisi akeh nek omah, moro kabeh, reka ulang kejadian. Didelok'i wong akeh mbak. Halah mbak lah wong polisine ora nulung'i blas. (Wawancara, RM pembunuhan, Binpas, 3 April 2012)

emm nek pas ditangkep yo enggak, tapi pas aku ketemu buser-buser iku sing roto-roto kabeh jahat, onok sing ngilokno aku, ngomong ngene, awaku iku mateni uwong, gawe jilbab wes coplokken ae jilbabmu iku, lebokno ndek taek, wes gak peduli awakmu lanang opo wedok, tak tembak sikilmu. Aku ditahan nek Polres Pare selama 55 hari, aku wes gak isok turu, dikek'i mangan wes perasaanku wedi tok, gak tak pangan mbak. (Wawancara, RM pembunuhan,, Binpas, 3 April 2012)

Dalam konteks yang berbeda, dapat disimpulkan persoalan ketidakadilan yang dialami subyek RM bahwa perlakuan-perlakuan aparat polisi yang kurang menyenangkan mengindikasikan adanya ketidakadilan dalam prosedural. Artinya, proses selama penangkapan hingga reka ulang subyek RM adalah proses yang tidak adil menurut subyek RM.

Implikasinya adalah hal ini menunjukkan bahwasannya apa yang dinilai adil juga dapat dijelaskan dengan teori atribusi. Atribusi dan penilaian keadilan berkaitan karena pemberian atribut atas individu atau kejadian yang didasarkan pada faktor-faktor yang melatarbelakanginya, yaitu sebab-sebab internal individu yang bersangkutan dan sebab eksternal yang menyangkut kejadian orang yang dinilai tersebut (Faturochman, 2002:70).

Dari fakta diatas dapat dijelaskan mengapa subyek RM menilai dan memberikan atribut terhadap proses reka ulang yang tidak adil dan perlakuan yang tidak seharusnya dilakukan oleh aparat polisi. Menurut subyek bahwa dirinya menilai bahwa perlakuan polisi jahat, kemudian dalam reka ulang anaknya tidak dibantu padahal kaki anaknya sakit, selanjutnya dirinya harus diolok-olok sejumlah polisi. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa kejadian yang subyek RM (pembunuhan) alami merupakan faktor penyebab mengapa subyek menilai bahwa apa yang diperlakukan kepada dirinya tidak adil.

Berbeda pula dengan subyek QQ (pencurian), ia justru berespon berbeda ketika polisi hendak menangkap dirinya, kondisi subyek yang tengah hamil besar, membuat subyek diperlakukan sewajarnya, dan subyek tidak menyatakan bahwa terdapat perlakuan yang kurang menyenangkan. QQ (pencurian), ditangkap pada hari senin tanggal 23 Januari 2011 sekitar pukul 14.00 bertempat tinggal di daerah kota Malang oleh aparat polisi. QQ(pencurian), mengatakan bahwasannya saat itu sedang mengunjungi rumah temannya, namun ia tidak menyangka bahwa dirumah temannya telah banyak polisi yang hendak menangkap dirinya.

*emm,... waktu itu aku ditangkap dirumah temenku itu mbak, terus dibawa dipolsek dinoyo, akhirnya dibawa ke polresta malang sini.
(Wawancara, QQ pencurian, Binpas, 23 Juli 2012)*

*oh itu dirumah temenku SMP, nah waktu itu aku maen kerumah temenku SMP itu, sudah janji juga maen kerumahnya, terus tau-tau ada motor banyak, akhirnya aku digrebek disitu, aku ikut ae mbak, mau ngelawan sich, motorku ae mau tak tinggal, aku mau kabur gitu, waktu aku hamil besar itu mbak. Wes sempet pengen kabur lari ae, tapi ya sudah langsung dibawa ke polsek Dinoyo, terus ke polresta situ
(Wawancara, QQ pencurian, Binpas, 24 Juli 2012)*

Subyek mengakui bahwasannya dirinya hendak melarikan diri, namun akhirnya aparat pun langsung menggiring subyek untuk ditahan.

Hal tersebut tidak berhenti pada penangkapan dan penyidikan saja, namun proses hukum bergulir pada proses persidangan. Lembaga peradilan berfungsi sebagai lembaga untuk mengadili setiap perkara. Keadilan prosedural dapat dilihat juga pada ranah peradilan pidana dalam pengadilan, mengingat keadilan prosedural diartikan sebagai mekanisme penentuan keadilan berdasarkan proses atau bentuk-bentuk prosedur. Indikasi adanya proses yang adil dalam sebuah persidangan adalah, ketika pelaku mendapatkan perlakuan yang sesuai, mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan, mendapat kesempatan untuk memberikan alasan keinginan untuk meringankan hukuman.

Kesempatan dalam menyampaikan pembelaan serta kesempatan untuk memberikan alasan keringanan, juga telah dilakukan oleh subyek QQ (pencurian),

namun tidak dilakukan oleh subyek NK, FB dan RM, hal ini secara umum dikarenakan adanya kekhawatiran jika hukuman yang diterimanya akan bertambah berat, artinya ia akan mendapatkan masa hukuman yang lebih berat dari vonis sebelumnya.

Pengakuan QQ (pencurian) dalam persidangan, bahwa ia meminta keringanan kepada hakim saat hakim memberikan pertanyaan kepada QQ (pencurian) apakah subyek menginginkan keringan sebanyak 2 kali, namun saat itu subyek tidak fokus dengan pertanyaan hakim, sehingga hukuman seharusnya dapat lebih ringan lagi, jika subyek fokus dalam menjawab pertanyaan hakim.

Nah waktu disidang itu sebenarnya dikasih pertanyaan keringanan 2 kali, tapi aku terlanjur gak dengerin, wes gak fokus, gak nyambung gitu mbak, aslinya dari 2 tahun 6 bulan, bisa turun lagi itu mbak, tapi akhirnya aku terlanjur mengatakan menerima. (Wawancara, QQ pencurian, Binpas, 24 Juli 2012)

awalnya aku dituntut 4 tahun, pasal 363 2 tahun, 372 2 tahun, lah hakim bertanya, apakah saudara terima dengan tuntutan 4 tahun, tak bilang ae, gak terima, aku kaget mbak. Aku membela diri. Saya tidak terima hakim, karena bukan saya otak dari perbuatan saya, saya disuruh suami saya berbuat ini, kalo saya tidak melakukannya, saya diancam ditinggal.

Terus hakimnya tanya, kenapa saudara mau melakukannya? kenapa tidak menolak? Tak bilang, saya tidak mungkin harus pulang kerumah orang tua saya ketika hamil besar, saya juga malu sama orang tua saya, ya saya terpaksa mengambil barangnya teman saya. Saya minta keringanan hakim, karena saya masih punya anak yang masih kecil, saya ingin merawat anak saya, saya masih ingin meneruskan sekolah saya, saya harus menebus kesalahan saya dengan orang tua saya. Saya tidak terima hakim. Ya aku membela diri mbak. (Wawancara, QQ pencurian, Binpas, 24 Juli 2012)

Proses persidangan QQ (pencurian) sedikit berbeda dengan persidangan subyek lainnya. Subyek pun mengatakan bahwasannya ia layak mendapatkan keringanan masa hukuman karena dirinya merasa diancam oleh suami, subyek masih memiliki anak yang masih membutuhkan perawatan dan subyek mengakui bahwa dirinya masih ingin menebus kesalahan kepada orang tuanya.

Proses persidangan tersebut menurut subyek telah berjalan sesuai prosedur yang tepat, hal tersebut juga disampaikan subyek bahwa dirinya bersyukur bahwa ia mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan dan memohon keringanan kepada hakim.

Serangkaian fakta yang dinyatakan oleh subyek QQ (pencurian), dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam persidangan pun, seorang terdakwa masih dapat mengupayakan hak yang seharusnya menjadi milik terdakwa, yaitu hak untuk mengajukan keringanan, mengajukan keberatan kepada hakim, serta menyampaikan pembelaan dirinya.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam teori *self interest model* yang dapat menjelaskan mengapa seseorang cenderung ingin diperlakukan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan proses yang *fair*, serta berupaya berjalan sesuai keinginannya (Faturochman, 2002:26). Bahwa secara prosedural subyek QQ (pencurian) telah mengupayakan pembelaan atas dirinya kepada hakim, dan hukumannya pun dapat lebih ringan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh subyek QQ (pencurian). Secara subyektif, prosedur dikatakan adil, jika dapat mengakomodasi kepentingan individu (Faturochman, 2002: 26). Dalam konteks fakta subyek QQ (pencurian), maka keringanan yang diberikan oleh hakim dalam proses persidangan merupakan hukuman yang mampu memenuhi atau mengakomodir kepentingan subyek agar tidak dihukum dengan masa hukuman yang lama.

Persidangan yang dijalani oleh NK, FB dan RM, hampir serupa, kebanyakan dari mereka bukan tidak mendapat kesempatan untuk mengajukan keringanan, namun kekhawatiran akan bertambahnya hukuman jika meminta keringanan, membuat mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan pembelaan dan memohon keringanan pada hakim. Seperti subyek NK (pengedar sabu) dalam persidangan, subyek tidak melakukan banding, karena takut jika vonis hukuman justru bertambah berat. Hukuman tersebut merupakan hukuman minimal, sehingga subyek merasa menerima hukuman tersebut, namun subyek merasa kurang menerima jika vonis yang ditetapkan 4 tahun 5 bulan kurungan penjara. Subyek menginginkan hukumannya selama 4 tahun 3 bulan

kurungan penjara. Hal ini karena menurutnya, beberapa teman yang melakukan tindak pidana terkait narkoba, mendapatkan vonis hukuman minimal 4 tahun dengan minimal 3 bulan kurungan penjara. NK (pengedar sabu) mengungkapkan;

enggak lah..aku takut malah kenaknya lebih berat, ini kan yo sudah hukuman minimal yaa (wawancara,NK pengedar sabu, Binpas, 13 Juli 2012).

ada juga temen, jadi dia itu kenanya 9 tahun tapi banding jadi 4 tahun, loh malah ada Bandar disini juga, sebenarnya kenaknya 4 tahun, terus banding akhirnya juga malah kena 10 tahun (wawancara, NK pengedar sabu Binpas, 13 Maret 2012).

Alasan NK (pengedar sabu) tidak mengajukan keringannya juga dikarenakan adanya sejumlah informasi dan pengalaman dari teman-teman NK (pengedar sabu) yang sebelumnya terkait pengajuan keringanan, namun justru hukumannya bertambah berat. Hal tersebut juga disampaikan oleh FB (pemakai sabu) bahwa dirinya tidak meminta keringanan hakim karena beberapa dari teman-temannya di dalam tahanan mengatakan bahwa jika memohon keringanan hukuman, maka kebanyakan hukuman dari kasus narkoba justru bertambah berat. Berikut ungkapan subyek;

aku sih gak banding atau minta keringanan, soalnya hukumanku itu hukuman minimal, kalo minta keringanan. Aku takut malah tambah berat lagi, soalnya banyak juga yang banding malah tambah berat. (wawancara,FB pemakai sabu, Binpas, 25 Juli 2012).

ya dikasih tau temen-temen waktu ditahan itu, mereka bilang, wes nanti kalo divonis hakim segitu, bilang aja nerima, daripada kamu dijeblesno lebih abot (wawancara, FB pemakai sabu, Binpas, 25 Juli 2012).

Kekhawatiran tersebut juga diungkapkan oleh subyek RM (pembunuhan) bahwa dirinya khawatir akan bertambahnya vonis hukuman, dan pada saat itu subyek RM (pembunuhan) mengakui bahwa dalam persidangan dirinya sangat bingung, sehingga hal tersebut membuat tidak fokus jika subyek ingin meminta keringanan hukuman.

aku yo mboh ora ngerti kok moro dadi 13 tahun, aku wes ra mudeng, wedi terus. Pokoke aku melu sidang. Aku wedi, wes ora

ngerti opo-opo. Pikiranku wes wedi ae (Wawancara, RM pembunuhan, Binpas, 3 April 2012)

Apa yang dikatakan adil sesuai prosedur adalah bagaimana subyek mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan dan memohon keringanan, namun hal tersebut tidak selalu terjadi dalam setiap proses persidangan.

Secara umum, dapat disimpulkan dari fakta diatas, bahwasannya alasan sejumlah subyek memilih untuk tidak mengajukan keringanan, melakukan pembelaan, dan permohonan banding adalah adanya kekhawatiran hukuman pidana akan bertambah berat dan masa hukuman lebih lama dari vonis hakim sebelumnya. Hal yang menarik, adalah berasal dari manakah mereka mengetahui bahwa jika melakukan banding akan bertambah berat hukumannya. Hampir ketiga subyek menyatakan bahwa informasi tersebut mereka ketahui dari teman-teman yang pernah melakukan banding, dan teman-teman ditahanan yang secara jelas dan nyata melakukan banding, kemudian hukumannya bertambah jauh lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa, mereka lebih dahulu membayangkan bahwa hukuman akan bertambah berat dan menilai bahwa usaha banding adalah usaha permohonan keringanan yang sia-sia, karena permohonan tersebut tidak akan memenuhi keinginan mereka agar dihukum ringan-ringannya. Justru menimbulkan penilaian bahwa usaha banding adalah usaha yang akan mencebloskan diri sendiri untuk dihukum lebih lama.

Oleh karena itu teori *refrence cognitive*, adalah teori yang relevan dalam memberikan penjelasan mengapa mereka menilai bahwa pengajuan banding akan menambah masa hukuman mereka. Teori *refrence cognitive* adalah stimulasi mental ketika seseorang membayangkan peristiwa dan keadaan yang berbeda dengan peristiwa atau keadaan yang sesungguhnya ia alami (Faturachman, 2002:73). Adapun proses seseorang dalam menganalisis kejadian tersebut dengan cara; pertama adalah referensi hasil, jika referensi hasil dikatakan tinggi bila perolehan yang dibayangkan lebih besar dibandingkan dengan perolehan nyatanya, hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Kedua, justifikasi. Konsep ini menekankan pada pentingnya peran peristiwa atau keadaan yang menyebabkan perolehan imajinatif (referensi hasil) dan perolehan

nyata. Justifikasi didefinisikan oleh terori ini adalah sebagai kesesuaian, penerimaan secara moral atau berhubungan yang selaras dua hal. Kemudian yang ketiga, adalah unsur peluang. Konsep ini dikemukakan dengan anggapan bahwa tidaklah cukup seseorang melakukan penilaian berdasarkan apa yang diperoleh sekarang. Kemungkinan perolehan pada masa yang akan datang dinilai tidak kalah pentingnya. Peluang yang rendah terjadi bila hasil yang diharapkan diterima pada masa mendatang sama atau lebih rendah daripada yang diperoleh sekarang. Sehingga dapat ditunjukkan bahwa secara kognitif mereka telah membayangkan beratnya hukuman jika mereka berusaha meminta keringanan dan permohonan banding kepada hakim.

Dalam proses persidangan, sejumlah subyek mengatakan bahwa mereka mengikuti sidang rata-rata sebanyak 4-5 kali sidang. Secara umum sidang pertama adalah pembacaan perkara, kemudian sidang kedua dan ketiga adalah kesaksian saksi, dan sidang keempat sering kali terjadi penundaan, sidang terakhir yaitu sidang ke lima, adalah tuntutan jaksa dan vonis hakim. Beberapa subyek menyatakan bahwa terdapat penundaan persidangan yang alasan penundaan persidangan, karena saksi tidak hadir dalam persidangan. Seperti yang diungkapkan oleh subyek NK (pengedar sabu), proses pengadilan pun dijalani sebanyak 4 kali, sidang pertama adalah pembacaan perkara, sidang kedua dan ketiga adalah kesaksian, namun terdapat penundaan pada sidang kedua, karena saksi tidak hadir, sidang ke empat adalah tuntutan jaksa dan vonis hakim. Kronologi selama dalam proses persidangan subyek pun menjawab pertanyaan dengan tidak berbelit-belit, kemudian pada penjatuhan vonis hukuman, hakim memvonis selama 4 tahun 5 bulan kurungan. Berikut ungkapan subyek;

ya dipengadilan, aku itu lek gak salah 4 kali sidang, sek..sek..iyo 4 kali sidang, sidang pertama pembacaan perkara, kedua ada mendatangkan saksi, tapi saksine tak tunggu gak onok akhir'e tunda minggu depannya lagi, terus sidang ketiga iku saksi polisi, terakhir iku yo langsung wes putusan hakim.(wawancara, NK pengedar sabu, Binpas, 13 Maret 2012)

Sama halnya seperti yang diungkapkan dalam proses persidangan FB (pemakai sabu), ia menyatakan bahwa dirinya menjalani sidang 6 kali, dan mengalami

penundaan persidangan. Subyek FB (pemakai sabu), juga tidak mengetahui alasan penundaan sidang yang ia jalani. Berikut ungkapan subyek;

kalo dipengadilan ya aku dituntut 4 th 3 bl, terus aku sidangnya itu 6 kali, pertama pembacaan, kedua saksi tanteku, yang ketiga saksi polisi yang make bareng tanteku dan aku, yang keempat itu saksi polisi pas nangkep, sidang kelima ditunda, yang terakhir itu tuntutan vonis. (wawancara, FB pemakai sabu, Binpas, 25 Juli 2012) aku sich gak tau, gak ada alasan apapun (wawancara, FB pemakai sabu, Binpas, 25 Juli 2012)

Berbeda dengan subyek QQ (pencurian), yang cukup memahami mengapa terdapat penundaan dalam persidangan dirinya. Subyek menjalani sidang sebanyak 5 kali. Pada sidang pertama, adalah pembacaan perkara, kemudian sidang kedua adalah kesaksian para saksi sebanyak 3 orang, meliputi teman-teman subyek, sidang yang ketiga dihadirkan saksi sebanyak 2 orang yaitu orang tua teman dari subyek dan guru dari subyek. Pada sidang keempat, terdapat penundaan. Sidang terakhir yaitu kelima, berisi tentang tuntutan jaksa dan vonis hakim. Adanya penundaan dalam persidangan dikarenakan tidak adanya kepastian dari suami subyek untuk kejelasan uang yang akan diberikan kepada jaksa dan suami subyek menjanjikan sejumlah uang kepada jaksa agar meringankan hukumannya, dan hal itu juga berdampak pada penundaan persidangan QQ (pencurian), mengingat bahwa QQ (pencurian), dan suaminya disidang secara bersamaan. Inilah ungkapan subyek;

5 kali, tapi 1 kali penundaan. Pertama itu pembacaan, kedua kesaksian saksi 3 orang temenku semua, yang ketiga kesaksian saksi 2 orang orang tuanya temen dan gurunya temenku. Sidang ke empat itu ditunda. Kelima tuntutan dan vonis. (wawancara, QQ pencurian, Binpas, 24 Juli 2012)

ya gara-gara jaksanya nunggu uang itu yang dijanjikan sama keluarganya suamiku itu mbak. (wawancara 18, QQ pencurian, Binpas, 24 Juli 2012)

Sedangkan subyek RM, menyatakan bahwasannya dalam persidangannya tidak terjadi penundaan persidangan. Dalam proses persidangan subyek menjalani sidang sebanyak 4 kali. Sidang pertama adalah pembacaan perkara, kemudian sidang kedua adalah kesaksian saksi (anak RM), sidang ketiga kesaksian orang lain yang

menyaksikan kobaran yang dibunuh oleh RM (pembunuhan), selanjutnya sidang keempat adalah tuntutan jaksa dan vonis hakim. Berikut ungkapan subyek;

empat kali, pertama pembacaan, kedua saksi iku anakku loro, ketiga saksine yang melihat korban kabeh 3 orang dan lanang, terus tuntutan terakhir vonis. (wawancara, Rm pembunuhan, Binpas, 3 April 2012)

Secara keseluruhan narapidana umumnya, merasa tidak adil dalam prosedural, sehingga mereka cenderung memaknai keadilan prosedural tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana tidak diperlakukan secara adil seperti perlakuan yang kurang menyenangkan dalam proses penangkapan oleh aparat polisi, penyidikan, sehingga penilaian tersebut akan berlanjut pada penilaian tidak adil dalam keadilan retributif dan restoratif.

3. Keadilan Retributif

Salah satu pencapaian keadilan retributif adalah adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Namun beberapa subyek mengatakan bahwa hukumannya tidak sebanding dengan perbuatannya. Seperti yang diungkapkan oleh RM (pembunuhan), QQ (pencurian) dan FB (pemakai sabu)

Subyek RM (pembunuhan), mengungkapkan bahwasannya hukuman yang didakwakan kepada dirinya terlampau berat, subyek merasakan bahwa menjalani 2 tahun masa hukuman merupakan hukuman yang sangat cukup menyiksa. Namun ia harus menerima kenyataan untuk menjalani selama 13 tahun masa hukuman penjara, yang baginya tidak sebanding dengan perbuatannya. Mengingat bahwa alasan subyek membunuh karena tuntutan ekonomi yang tinggi. Berikut ungkapan subyek RM;

*iya mbak gak po-po (menangis)
Oalah..ya wes ngene iki mbak, rasane kyok kapok-kapok'o 2 tahun dipenjara nek kene, wes cukup rasane. Aku wes jan gak wani mbak nyawang duwur iku. (menunduk dan mengelus dada) (wawancara, RM pembunuhan, Binpas, 3 April 2012).*

Hal serupa juga dinyatakan oleh subyek QQ dalam kasusnya pencurian, bahwa hukuman yang didakwakan oleh hakim kepada dirinya tidak sebanding dengan

perbuatannya. Ketidak sebandingan terhadap vonis masa hukumannya dengan perbuatannya, ia ungkapkan dalam persidangan. Ia mengatakan kepada hakim bahwasannya ia menginginkan keringanan hukuman. Subyek pun mengatakan bahwasannya ia layak mendapatkan keringanan masa hukuman karena dirinya merasa diancam oleh suami, subyek masih memiliki anak yang masih membutuhkan perawatan dan subyek mengakui bahwa dirinya masih ingin menebus kesalahan kepada orang tuanya. Adapun sebagai berikut ungkapan subyek;

gak sebanding lah mbak, karena aku melakukan itu semua disuruh suamiku, posisiku diancem suamiku, pas aku hamil pisan dan terpaksa aku melakukan itu, karena takut ditinggal (wawancara, QQ pencurian, Binpas, 24 Juli 2012)

Tak kalah menarik seperti yang diungkapkan oleh FB (pemakai sabu) dalam kasusnya sebagai pemakai sabu-sabu. FB (pemakai sabu) mengatakan bahwa hukuman 4 tahun 1 bulan kurungan penjara adalah hukuman yang tidak sebanding dengan apa yang ia perbuat. Alasan ini karena subyek adalah pemakai dan ia baru saja memakai sabu, sehingga hukuman yang sebanding bagi pemakai yang baru adalah hukuman rehabilitasi. Berikut ungkapan subyek;

ya gak sebanding mbak, karena aku kan barusan jadi pemakai, ya hukumannya gak segitu harusnya. Tapi akhir-akhir ini aku mikirnya ya sudah lah diterima dan dijalani ae, toh buktinya habis ini keluar. (wawancara , FB pemakai sabu, Binpas, 25 Juli 2012)

Sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh subyek NK dalam kasusnya pengedar sabu-sabu, bahwa dirinya merasa sebanding antara perbuatan yang dilakukannya dengan masa hukuman 4 tahun 3 bulan kurungan. Adanya kesebandingan antara hukuman dan perbuatan, juga membuat subyek merasa hukumannya sebanding dengan apa yang telah ia lakukan. Seperti yang diungkapkan oleh subyek;

yo sebanding lah dengan minimal 4 tahun, ya iya setimpal. (wawancara, NK pengedar sabu, Binpas, 13 Juli 2012).

Kesebandingan antara beratnya pelanggaran yang dilakukan subyek dengan hukuman vonis pidana yang didakwakan hakim, menjadikan dirinya mengakui bahwasannya hukuman tersebut setimpal dengan minimal hukuman 4 tahun.

Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwasannya, putusan hakim yang didakwakan oleh sejumlah subyek, dirasa kurang tepat dan terlalu berat bagi mereka. Mereka beranggapan adanya ketidaksesuaian antara hukuman dengan tindakan yang mereka lakukan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa mereka menilai hukuman tersebut tidak adil. Secara retributif, hukuman tersebut tidak memberikan keadilan pada mereka. Seperti misalnya, hukuman bagi subyek RM (pembunuhan) yang membunuh seorang rentenir, karena RM (pembunuhan) terpaksa harus melakukannya karena himpitan ekonomi. RM divonis hukuman selama 13 tahun. Hal ini bagi dirinya terlampau berat. Hal serupa juga diungkapkan oleh FB (pemakai sabu), menurutnya hukuman selama 4 tahun 1 bulan kurungan, adalah hukuman yang terlampau lama dan menjenuhkan, hal ini karena subyek merasa bahwa dirinya adalah pemakai sabu yang baru saja memakai sabu. Bagi dirinya hukuman yang tidak berat adalah hukuman rehabilitasi selama 8 bulan hingga 1 tahun. Fakta tersebut menunjukkan bahwa secara retributif, subyek FB (pemakai sabu) merasa tidak adil atas hukuman pidananya. Fakta yang serupa juga disampaikan oleh subyek QQ (pencurian) bahwa dirinya mencuri karena alasan dipaksa suami, sehingga hukuman bagi dirinya selama 2 tahun 6 bulan adalah hukuman yang tidak tepat, hal ini menunjukkan bahwa secara retributif, hukuman tersebut tidak adil dan terlalu berat.

Narapidana secara umum, memaknai keadilan retributif bahwa narapidana merasa tidak adil antara hukuman pidana yang diterimanya dengan tindakan yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana merasa putusan vonis hukuman pidana terlalu berat dan masa hukumannya terlalu lama. Narapidana juga merasa hukumannya tidak sebanding dengan perbuatannya.

Hal ini dapat dijelaskan mengapa seseorang cenderung menilai tidak adil dalam hukumannya. Faturochman dan Djamaludin Ancok (2001:41-60) menunjukkan bahwa suatu prosedur yang tepat akan berpengaruh pada penilaian seseorang tentang keadilan prosedural. Asumsi tersebut dapat menjelaskan bahwa ketika seseorang

menilai bahwa prosedur hukum yang telah dijalannya penuh dengan ketidakadilan, maka penilaian awal tersebut akan berpengaruh pada penilaian selanjutnya terkait adil tidaknya suatu hukuman yang diperolehnya (retributif). Teori *Heuristic* dapat menjawab pertanyaan bagaimana penilaian keadilan secara kognitif terbentuk dan pertanyaan terkait informasi apa yang digunakan seseorang untuk membentuk penilaian keadilan (Faturochman, 2002:80). Informasi yang penting yang digunakan untuk menilai keadilan adalah informasi yang berkaitan dengan inklusi dan eksklusi dari kelompok serta informasi tentang penerimaan dan penolakan kelompok terhadap cara-cara distribusi yang berlaku (Faturochman, 2002:80). Dalam konteks narapidana, seseorang cenderung memberikan penilaian awal berdasarkan pada kesan pertama pada proses penangkapan, bahwa dirinya tidak diperlakukan adil, sehingga informasi awal pada penilaian tersebut akan berlanjut ketika seseorang menilai apakah hukumannya (secara retributif) adil atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa kesan awal yang salah akan berlanjut pada penilaian yang kurang tepat, hal tersebut yang dimaksud dengan *bias generalization fallacies*.

4. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan model keadilan yang berusaha memenuhi rasa keadilan semua pihak, yaitu pihak korban, pelaku dan masyarakat. Salah satu pencapaian adanya keadilan yang mampu merestorasi berbagai pihak tersebut adalah bahwa pelaku tindak pidana dilibatkan untuk usaha menyembuhkan apa yang rusak. Artinya, apa yang menurut masyarakat perilaku kriminal adalah perilaku yang salah dan merusak bagi diri pelaku, maka dalam rangka mencapai keadilan restoratif, pelaku juga dilibatkan dalam proses memperbaiki perilakunya yang melanggar norma dalam masyarakat. Adanya perubahan perilaku yang lebih baik pada diri pelaku tindak pidana, hal tersebut merupakan indikasi tercapainya keadilan restoratif.

Munculnya perubahan kearah yang lebih baik pada diri pelaku, juga diungkapkan oleh semua subyek. Kebanyakan dari subyek penelitian mengatakan bahwa adanya perubahan dalam aspek spiritual, kemudian dilanjutkan dengan adanya perubahan cara berfikir dalam memandang masalah. Seperti yang diungkapkan oleh subyek NK dalam kasusnya pengedar sabu-sabu. Pendekatan spiritual, rupanya mampu membuat subyek untuk lebih dekat dengan Tuhan, hal tersebut diakuinya bahwa selama berada di lapas,

subyek dapat belajar untuk mengaji. Lapas juga mengajarkan ia pada proses untuk mengendalikan dirinya. Ia kembali bersyukur bahwasannya apa yang ia jalani saat ini membuat cara pandanganya berbeda ketika melihat dunianya. Seperti yang diungkapkan subyek;

aku itu orangnya giniiii---pokoknya apapun yang terjadi sama aku, aku selalu hubungkan dengan Allah. Sekarang ini aku juga---aku mikirnya kalo aku memang kayak gini---yaweslah. Mungkin emang ini---aku sudah sadar, aku yakin mesti ada sebuah jalan buat aku, toh kenyataannya aku diluar gak bisa ngaji, disini malah bisa ngaji. (wawancara,NK pengedar narkoba, Binpas, 13 Maret 2012).

ya yang pastinya aku disini bisa ngaji, belajar lebih sabar, belajar, untuk mengendalikan emosi, aku dulu suka tersinggungan, akhirnya disini aku belajar untuk lebih meredam emosi, jadi ketika ada orang yang kasar sama aku, ya sudah aku berusaha untuk meredam emosiku, aku juga bersyukur meskipun aku dipenjara, untung anak-anakku baik semuanya gak kayak aku, ya cara pandangku juga berubah. (wawancara,NK pengedar narkoba, Binpas, 13 Juli 2012). Ya semoga juga aku isok nerusno ini juga ketika dirumah nanti (wawancara, NK pengedar narkoba,Binpas, 23 Juli 2012).

Hal serupa juga diungkapkan oleh subyek RM dalam kasusnya pembunuhan bahwasannya dirinya seperti lebih dekat dengan Tuhan. Hal tersebut seperti diungkapkan subyek;

iyu mbak, aku melu jamaah terus, selama nek kene aku wes pasrah, tak gawe poso, ibadah. Nek biyen aku jarang-jarang, tapi semenjak nek kene aku sering sembayang bengi mbak, bukane pamer yo. Tapi rasane nek gak sembayang bengi iku, kyok-kyok gelo ngunu, menyesal. Dalam vonis yang didakwakan oleh hakim, subyek mengatakan hukuman pembedaan selama 13 tahun, membuat ia jera atas perbuatan yang ia lakukan. (wawancara, RM pembunuhan, Binpas, 3 April 2012)

Pembedaan dalam lapas memberikan manfaat bagi subyek QQ dalam kasus pencurian dan FB dalam kasus pemakai sabu seperti halnya kedekatan spiritual, serta perubahan menjadi lebih sabar, mampu memahami karakter orang lain, serta mampu

mengontrol diri. subyek lebih sabar, kemudian dapat mengendalikan nafsu, lebih dewasa dalam berfikir panjang dan bertindak lebih berhati-hati. Kedekatan spiritual pun mulai ia dapatkan ketika subyek berada di dalam lapas, ia pun rajin sholat dan mengaji hingga belajar untuk berpuasa dan sholat terawih.

Berikut ungkapan QQ ;

aku lebih bersabar mbak, disini belajar sabar, bagaimana rasanya menunggu bebas dan cepet keluar dari sini. (wawancara, Binpas, 24 Juli 2012). Perubahannya itu, ya perubahan disiplin, terus disini ini juga bisa belajar milih-milih temen, karena penjara kan tempatnya orang-orang yang karakter beda-beda, dan mereka juga kelihatan banget mana yang jahat, mana yang baik, disini kita bisa belajar tahu karakter orang lain, aku juga sekarang lebih menghargai orang tua, lebih khusuk kalo sholat, lebih sering sholat juga mbak, lebih sayang sama mama, karena aku juga sudah jadi seorang ibu. (wawancara, QQ pencurian, Binpas, 24 Juli 2012)

Berikut ungkapan FB ;

wah aku disini jadi lebih sabar, bisa menahan diri, bisa menahan nafsu, lebih dewasa, cara berfikirnya juga sekarang mau ngelakuin apa-apa dipikir dulu, jangka panjangnya dipikir dulu, terus disini aku bisa sholat, ngaji, puasa, terawih, diluar belum tentu aku menjalankan kayak gitu itu semua. (wawancara, FB pemakai sabu, Binpas, 25 Juli 2012)

Kesimpulan dari fakta diatas adalah, bahwasannya secara keseluruhan, mereka yang menjalani masa hukuman dalam lembaga permasyarakatan, mampu dan menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik bagi diri mereka. Menurut mereka, bahwa di dalam lembaga permasyarakatan telah mendapatkan peningkatan dalam hal spiritual, kontrol diri, berfikir tentang jangka panjang dan lebih berhati-hati dalam berbuat. Perubahan kearah positif ini bagi mereka menunjukkan bahwa program pembinaan narapidana yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan dapat dikatakan berhasil dan sukses.

Meskipun secara umum narapidana merasa tidak adil, namun mereka merasa bahwa hukuman pemidanaan (hukuman penjara) dapat memberikan manfaat dan membawa perubahan bagi dirinya selama berada dalam lembaga permasyarakatan.

SIMPULAN

Secara umum, narapidana memberikan makna keadilan adalah lebih mengenai prinsip persamaan (*equality*) antara pembagian hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama (procedural) namun terdapat subyek yang memaknai keadilannya berdasarkan apa yang telah didapat/manfaat (restoratif) yang diperoleh atas hukuman (retributif) yang telah didakwakan hakim.

Sedangkan makna keadilan prosedural, secara umum subyek penelitian merasa tidak adil secara prosedural. Selanjutnya untuk makna keadilan retributif, subyek merasa tidak adil atas hukuman yang telah diterimanya. Meskipun secara keseluruhan subyek penelitian mengatakan tidak adil, namun dalam kehidupan di lembaga permasyarakatan, hampir seluruh subyek merasakan mendapat banyak perubahan dan peningkatan pada aspek spiritual.

Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa perlakuan yang baik untuk pelaku kejahatan atau narapidana pada proses-proses hukum akan memberikan penerimaan pada putusan mereka. Hasil penelitian ini juga menyiratkan tuntutan bahwa aparat hukum perlu mengeraahui kebutuhan psikologis untuk memberi akses informasi proseder dan kepastian sehingga mereka menerima putusan hakim.

PUSTAKA ACUAN

- Budiningsih, C, A. (2001). Penalaran Moral Remaja dan Beberapa Faktor Budaya yang Berhubungan Dengannya. *Disertasi*; tidak dipublikasikan. Malang: PPS Universitas Negeri Malang
- Byrn, D & Robert A. B. (2003). *Psikologi Sosial*. Jakarta : Erlangga
- Colquitt, J. A (2001). On the Dimensionality of Organizational Justice : A Construt Validation of A Measure. *Journal of Personality and Social Psychology*, 86 (3), 386-400
- Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C.O.L.H & Yee Ng, K (2001), *Justice at the millennium : a meta-analytic review of 25 Years of Organizational Justice Research*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 86 (3), 425-445

- Faturochman & Ancok, D. (2001). *Dinamika Psikologis Penilaian Keadilan*. Jurnal Psikologi No. 1, 41-60.
- Faturochman. (2002). *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Frestinger, L. (1954). *A Theory of Social Comparison Processes*. Human Relations, 7, 117-140
- Frestinger, L. (1969). *Cognitive Dissonance*. Scientific American : Science, Conflict, and Society. W. H. Freeman & Co., San Fransisco
- Fuady, Munir. (2007). *Dinamika Teori Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Husein, Syahrudin. (2003). *Kejahatan dalam Masyarakat dan Penanggulangannya*. USU : Fakultas Hukum
- Lind, E. A & Early, P.C (1992). *Procedural Justice and Culture*. International Journal of Psychology. 27, 227-242
- Manulang, E. F. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Master, J. C & Smith, W.P (1987). *Generic Comparison Processes in Human Judgement and Behavior*. In Master. J. C & Smith, W.P (eds). Lawrence Erlbaum, London
- Master, J. C & Smith, W.P (1987). *Social Comparison, Social Justice, and Relative Deprivation: Theoretical, Empirical, and Polycy Perspectives*. Lawrence Erlbaum, London
- Miles, M. B & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. T.R Rohisi (Penerjemah). Jakarta : UI Press
- Morris, A & Gabrielle M. (2001). *Restorative Justice for Juveniles : Conferencing, Mediation and Circles*. Hart Publising : Oxford Portland Oregon hal 5-6
- Muluk, Hamdi. (2010). *Problem Kekerasan dan Ketidakadilan Sosial di Indonesia : Tinjauan Psikologi Politik*. Handout Dies NatalisVI UIN Maliki Malang.
- Myers, David G. (2010). *Psikologi Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika
- Nuqul, F L & Sa'diyah, E. H. (2010). *Sikap Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Komunitas Muslim : Ditinjau dari Nilai Moral Religius dan Sikap pada Jenis Kelamin Lain (Sexism)*. Laporan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Maliki Malang

- Nuqul, F L. (2008). Peran Penilaian Keadilan terhadap Komitmen Organisasi: Telaah Psikologi Sosial Keislaman. *Jurnal Psikoislamika* Vol.5, No.1, 39-59
- Nuqul, F L. (2008). Pesantren Sebagai Bengkel Moral Optimalisasi Sumber Daya Pesantren untuk Menanggulangi Kenakalan Remaja. *Jurnal Psikoislamika* Vol.5, No.2, 163-182.
- Nuqul, F L. (2011). Nilai-Nilai Dalam Pertimbangan Seriousness of Crime Kajian Pada Komunitas Muslim. *Jurnal Ilmu Syari'ah "Asy-Syiri'ah"*, Vol.45, No. 11. 1-11
- Rawls, J. (2006). *A Theory Of Justice : Teori Keadilan Dasar-Dasar Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- S. Sharpe, (1998). *Restorative Justice : A vision For Healing and Chage* (Alberta, Edmonton Victim Offender Mediation Society, Edmonton.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2003). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Setiono, Kusdwiratri. (2009) *Psikologi Perkembangan: Kajian Teori Piaget, Selman, Kohlberg, dan Aplikasi Riset*. Tt.: Widya Padjadjaran.
- Sternberg. Robert J. (2008). *Psikologi Kognitif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Thibaut, J & Walker, L. (1975). *Procedural Justice: A Psychological Analysis*. Erlbaum. Hillsdale, NJ
- Vidmar, N. (2001). *Retributive Justice: Its Social Context*. In M. Ross, & D. Miller, *The Justice Motive in Everyday Life* (pp. 1-18). Cambrige: Cambridge U Press.
- Walker, I. & Pettigrew, T. F (1984). *Relative Deprivation Theory : An Overview and Conceptual Critique*. British Journal of Social Psychology, 23(4). 301-310
- Winarta, Frans H. "*Fenomena Premanisme dan Pemberantasan Kejahatan*", <http://www.sinarharapan.com>. diakses tanggal 22 November 2010.
- Wiranta , Dewa Nyoman Nanta, Faisal Abdullah dan Syamsul Bachri. (2010). *Peran Hukum Terhadap Penanganan Aksi Kerusuhan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Di Porvinsi Maluku Utara. Suatu Kajian Perspektif Keadilan Restoratif*. Hal 1-13
- Zulfa, Eva Achjani. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung : Lubuk Agung

